

BAB VII

ISU STRATEGIS DAN RAD**7.1. ISU STRATEGIS**

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) Isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Provinsi Kaltara, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Provinsi Kaltara, dan (3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah RPJPD Provinsi Kaltara dan isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global

Rendahnya daya saing sumber daya manusia Provinsi Kaltara terkait dengan relatif rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Rendahnya kualitas pendidikan penduduk ini akan menjadi salah satu penghambat bagi berkembangnya sebuah daerah, mengingat penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial sebagai pelaku aktif untuk menggerakkan pembangunan. Kualitas pendidikan penduduk yang rendah, tidak memungkinkan penduduk untuk dapat menangkap pengetahuan, informasi maupun teknologi baru. Tanpa diimbangi oleh kemampuan untuk menyerap informasi baru yang berkembang dengan cepat maka kemampuan untuk melakukan inovasi dalam memanfaatkan potensi yang tersedia di daerahnya akan menjadi lambat. Sementara untuk mengembangkan sebuah daerah diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk menggerakkan pembangunan dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Perlu dicatat pula bahwa pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dalam arti pendidikan yang sesuai dengan kondisi wilayah di provinsi ini.

2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan

Pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Kaltara masih bersumber dari kegiatan perekonomian di sektor primer, yakni sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Meski kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan setiap tahun dari

17,86% tahun 2010 menjadi 17,01% tahun 2014, namun sektor tersebut masih menjadi penyumbang kedua terhadap PDRB Provinsi Kaltara. Sementara sektor pertambangan dan penggalian cenderung meningkat kontribusinya dari 30,33% tahun 2010 menjadi 31,99% tahun 2014. Kedua sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Provinsi Kaltara yakni 49%. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang berbasis pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Perluasan dan pengembangannya juga rentan merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana.

3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan

Hingga saat ini potensi sumber daya pertanian tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan maupun kelautan dan perikanan. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian ini secara aktual dikarenakan oleh beberapa indikasi, seperti: (1) Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan (padi); (2) Masih adanya suplai produk-produk pertanian dari luar wilayah; (3) Belum berkembangnya industri-industri pengolahan berbasis produk pertanian. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan kondisi infrastruktur (jalan) yang mempengaruhi kelancaran distribusi sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian (pupuk, obat-obatan dan peralatan) masih perlu mendatangkan dari luar. Kondisi sarana transportasi yang kurang memadai membuat distribusi sarana produksi pertanian menjadi mahal, di lain pihak biaya angkut hasil pertanian untuk pemasaran juga mahal. Bahkan terdapat beberapa area pertanian menjadi terisolir dikarenakan keterbatasan infrastruktur transportasi. Oleh karena itu pembangunan sektor pertanian harus ditopang oleh pengembangan infrastruktur pertanian yang pro pertanian.

Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan akan selalu muncul, mengingat jumlah penduduk akan semakin bertambah, sementara penambahan penduduk tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lahan pertanian, bahkan lahan pertanian cenderung mengalami penurunan luas karena perubahan fungsi. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke arah pemanfaatan non pertanian merupakan ancaman terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang sangat berpengaruh terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan.

Demikian pula dengan sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Sumber daya kelautan dan perikanan di provinsi ini memiliki potensi yang cukup besar mengingat sebagian besar wilayah berada di pesisir dengan garis panjang pantai 3.995 Km. Akan tetapi sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akibat berbagai keterbatasan

Sementara sub sektor perkebunan yang sedang berkembang adalah perkebunan kelapa sawit. Selama tahun 2008-2012 luas lahan perkebunan kelapa sawit meningkat dari 62.609,50 Ha (tahun 2008) menjadi 137.389,00 Ha (tahun 2012). Dalam kurun waktu tersebut produksi kelapa sawit meningkat dari 21.754 ton menjadi 513.448 ton. Namun patut dicatat bahwa pada satu sisi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu alternatif untuk penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali akan mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagi pembangunan pertanian non perkebunan. Siklus daur kelapa sawit yang cukup lama antara 25-30 tahun mengakibatkan terjadi kecenderungan untuk memperluas areal dalam bentuk kebun baru yang akan mengokupasi lahan pertanian produktif, sehingga terjadi gangguan pada produksi tanaman pangan. Pengembangan sektor perkebunan non kelapa sawit merupakan salah satu peluang yang dapat didorong sebagai perkebunan rakyat baik besar maupun kecil dengan komoditas yang prospektif dan produktif misalnya karet, kakao, kelapa, dalam bentuk monokultur maupun tumpang sari dengan konsep produktif dan konservatif.

Tidak jauh berbeda, sumbangan sub sektor kehutanan terhadap PDRB juga masih rendah ataupun kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan. Sumber daya hutan yang melimpah belum mampu menjadi penopang utama bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar hutan. Program-program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*) belum terlihat wujud dan keberhasilannya. Di sisi lain pengelolaan hutan berbasis korporasi dan modal besar juga belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam membangun perekonomian masyarakat. Pada sisi yang lain peran ekonomi sektor kehutanan masih mempunyai tantangan pada aspek legalitas terutama pada perusahaan skala kecil, dan juga pemanfaatan hasil hutan non kayu.

Sementara itu peningkatan produksi batubara disatu sisi menguntungkan karena dapat meningkatkan PDRB pertambangan non migas yang akan berpengaruh terhadap

peningkatan PAD, tetapi di sisi lain mengakibatkan peningkatan area penambangan batubara dan kerusakan lingkungan antara lain 1) pengaruh air asam tambang yang berasal dari limbah batuan sedimen, 2) kerusakan infrastruktur jalan, 3) kebisingan aktifitas penambangan, 4) kualitas udara, 5) limbah BBM dari kendaraan angkut tambang, 6) tidak melakukan reklamasi pasca penambangan atau kualitas reklamasi sangat jelek, 7) banyak terjadi genangan air pada area bekas penambangan, 8) meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air sungai.

4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan

Berbagai isu terkait dengan ketersediaan jaringan transportasi ini tentunya dapat mengakibatkan kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan sosial di Provinsi Kaltara. Dukungan jaringan transportasi berupa jalan, jembatan, terminal (terminal angkutan darat, stasiun, bandara dan pelabuhan) dan layanan transportasi akan memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan mendukung pergerakan barang.

Permasalahan transportasi di Provinsi Kaltara secara mendasar belum tercapainya kondisi infrastruktur yang memadai dan berkualitas dan masih rendahnya konektivitas antar wilayah yang berdampak pada keterbatasan aksesibilitas berbagai sektor. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas serta masih lemahnya konektivitas antar wilayah mengakibatkan beberapa wilayah masih tertinggal.

Masih buruk dan kurangnya aksesibilitas masyarakat perbatasan terhadap pusat kegiatan ekonomi dalam negeri yang terdekat, mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi wilayah tertinggal. Akses menuju dan/atau dari kawasan perbatasan secara umum menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Namun pelayanannya hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda transportasi, ongkos atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan transportasi.

Selain itu jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Provinsi Kaltara belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebagai wilayah yang memiliki desa-desayang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kaltara, khususnya yang tinggal di perbatasan. Keterhubungan dengan sanak, saudara dan handai taulan di wilayah lain Indonesia di luar perbatasan akan mampu mengurangi perasaan terisolasi, meningkatkan kesatuan dan persatuan

bangsa. Ketersediaan informasi akan memberikan kemudahan masyarakat mengembangkan potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan yang ada.

5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran

Wilayah pesisir bagian timur memiliki keterbukaan dan akses yang lebih baik dibandingkan wilayah pedalaman bagian barat. Hal ini diantaranya dicirikan oleh distribusi kota-kota besar yang berada di wilayah bagian timur dan begitupun dengan nilai PDRB kabupaten/kota yang juga lebih besar di wilayah bagian timur. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan terkesan diarahkan pada wilayah-wilayah yang memang siap dan cenderung memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, sementara wilayah yang belum berkembang sesuai arahan tata ruang adalah wilayah yang berfungsi secara ekologis sehingga perkembangannya memerlukan pembatasan.

Masih rendahnya pemerataan kesejahteraan akibat kemiskinan di Provinsi Kaltara dapat disebabkan oleh banyak faktor baik faktor dari dalam maupun luar. Salah satu akar permasalahan kemiskinan adalah tidak meratanya distribusi kegiatan ekonomi. Dengan kata lain pusat pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada kabupaten/kota tertentu. Kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah yang memiliki keunggulan sumberdaya alam dan infrastruktur dasar yang relatif sudah baik.

Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya inflasi di Provinsi Kaltara, yakni 11,91% pada tahun 2014. Angka ini jauh melebihi tingkat inflasi nasional yang hanya 8,36% pada tahun yang sama. Tingginya inflasi dapat mengindikasikan tingginya harga barang dan jasa di masyarakat, besarnya jumlah uang yang beredar dan tingginya tingkat daya beli yang harus dimiliki masyarakat. Hal ini menyebabkan standar hidup yang semakin tinggi sehingga sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal. Belum optimalnya pengembangan usaha di sektor produktif bagi masyarakat juga menjadi alasan tidak terjangkaunya kebutuhan minimal atau dengan kata lain rendahnya pendapatan masyarakat dan menjadikan sebagian penduduk tergolong penduduk miskin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata Provinsi Kaltara berada di posisi angka 5,79% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan kesempatan kerja atau belum optimalnya perluasan kesempatan kerja. Rendahnya kesempatan kerja dapat dilihat dari masih rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja oleh PMDN/PMA yaitu hanya 17,40. Rendahnya daya serap tenaga kerja dapat disebabkan

oleh kondisi kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan permintaan serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.

Penyebab lain tingginya jumlah pengangguran adalah belum memenuhinya kualitas tenaga kerja tersedia dengan permintaan tenaga kerja sehingga menyulitkan penyalurannya kepada penyedia lapangan pekerjaan. Tingkat pendidikan terakhir tenaga kerja di Provinsi Kaltara paling besar adalah tamat Sekolah Dasar, yaitu 27,92%. Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini tentu mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan keterbatasan kemampuan dalam bekerja di sektor-sektor tertentu.

6. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial

Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Namun kondisi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur masih sangat lemah. Oleh sebab itu masih sering dan banyak terjadi kegiatan ilegal seperti perdagangan ilegal, *human trafficking*, TKI ilegal hingga penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ilegal khususnya perdagangan barang lintas batas disebabkan antara lain oleh faktor harga dan tingkat aksesibilitas.

Harga barang terutama barang produk dalam negeri di wilayah perbatasan tergolong sangat mahal apabila dibandingkan dengan harga di wilayah lainnya. Tingginya harga barang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan sarana ekonomi berupa pasar dan mahal biaya transportasi barang dari tempat produksi menuju ke wilayah perbatasan. Saat ini kondisi sarana ekonomi di wilayah perbatasan tidak hanya jumlahnya saja yang sedikit tetapi juga konstruksi bangunannya yang tidak permanen (tidak memiliki atap, lantai, dan dinding). Hal tersebut di atas menyebabkan kurangnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok sehingga sulit didapat dan harganya yang kemudian menjadi tinggi.

Mahalnya harga produk dalam negeri mendorong masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk lebih memilih membeli barang kebutuhan pokok dari Negara Malaysia yang relatif lebih murah. Perdagangan barang lintas batas yang dilakukan masyarakat perbatasan tergolong perdagangan ilegal karena seringkali menggunakan jalur setapak, tanpa izin jual, dan tidak dikenakan pajak karena tidak melewati imigrasi resmi.

Kawasan perbatasan darat dan perairan Indonesia-Malaysia yang memiliki perkembangan dari sisi ekonomi yang lebih dipengaruhi oleh wilayah Malaysia

daripada wilayah Indonesia, yang berpotensi terjadinya kebocoran ekonomi, yang tidak mendukung prinsip kedaulatan negara. Hal ini karena kondisi permukiman yang cenderung mengelompok pada wilayah yang secara geografis datar serta memiliki karakteristik perkotaan yang ditunjang dengan jalur transportasi darat dan air. Sedangkan transaksi perdagangan dengan menggunakan transportasi udara akan berdampak pada harga produk olahan dan non olahan yang cenderung lebih mahal jika didatangkan dari luar wilayah. Hal ini sangat dirasakan daerah perdesaan dan perbatasan. Selain itu, kenyataan yang ditemui adalah masyarakat dihadapkan pada produk impor dari Malaysia yang lebih murah karena keadaan akses transportasi yang lebih baik. Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya memilih membeli produk-produk dari Malaysia.

Faktor lainnya adalah masih buruk dan kurangnya aksesibilitas masyarakat perbatasan terhadap pusat kegiatan ekonomi dalam negeri yang terdekat. Tingkat aksesibilitas yang dimaksud erat kaitannya dengan ketersediaan sarana transportasi. Akses menuju dan/atau dari kawasan perbatasan secara umum menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Namun pelayanannya hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda transportasi, ongkos atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan transportasi.

Ketertinggalan wilayah perbatasan mengakibatkan banyak terjadi kegiatan ilegal seperti perdagangan ilegal, *human trafficking*, TKI ilegal hingga penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ilegal khususnya perdagangan barang lintas batas disebabkan antara lain oleh faktor harga dan tingkat aksesibilitas, selain karena kondisi pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan masih sangat lemah.

Sulitnya distribusi barang di wilayah perbatasan tersebut berdampak pada mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Pasokan barang sering terhambat karena kerusakan jalan yang dialui. Bahkan bagi masyarakat Kecamatan Simanggaris, Kabupaten Nunukan, sebagian barang kebutuhan terpaksa didatangkan dari Tawau, Malaysia karena harga yang murah serta mudah diperoleh dibandingkan lewat Pulau Nunukan. Dikhawatirkan masyarakat Indonesia di perbatasan akan semakin tergantung kepada fasilitas dan layanan umum yang ada di Malaysia. Tanpa perhatian yang memadai dari pemerintah, masyarakat Indonesia akan semakin terpinggirkan secara fisik dan kejiwaan dari bumi pertiwi. Nasionalisme mereka akan tergerus dalam jangka panjang dan dikhawatirkan akan terjadi perpindahan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Malaysia. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan, pemerintah harus mencukupi

semua kebutuhan masyarakat Indonesia di perbatasan dan menjaga kedaulatan negara sebagai negara besar yang bermartabat. Selain itu, kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*) yang semakin meningkat di wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing, termasuk di wilayah perairan provinsi ini yang sangat merugikan para nelayan lokal. Kondisi ini mengakibatkan wilayah perbatasan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi ini, terlihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, harga bahan kebutuhan pokok yang cukup mahal, dan terbatasnya peluang pasar bagi kegiatan produksi untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih agar ke depan persoalan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan segera teratasi. Kondisi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan, ancaman potensi konflik karena masalah penguasaan sumber daya alam, serta tantangan ke depan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 merupakan permasalahan penting terkait dengan permasalahan di wilayah perbatasan. Langkah ini dilakukan sebagai wujud pemberian kepastian pemerintah daerah dalam menjamin nilai kemakmuran wilayah perbatasan juga dalam rangka menjaga nilai keutuhan NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang.

7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi

Selama ini pasokan listrik dan kebutuhan listrik di Provinsi Kaltara tidak seimbang, dimana pasokan listrik lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan listrik. Selama ini listrik hanya mengandalkan dari pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan BBM jenis solar. Oleh karena itu Provinsi Kalimantan Utara dikategorikan **krisis listrik** selama ini dan menjadi permasalahan yang serius.

Di Provinsi Kaltara persentase rumah tangga pengguna listrik baru mencapai sekitar 55%. Target rasio elektrifikasi secara nasional sebesar 100% masih jauh dari kondisi riil saat ini. Meskipun produksi listrik serta jumlah listrik yang terjual mengalami peningkatan, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada.

Demikian juga dengan bahan bakar mesin yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun industri masih sangat terbatas. **Lambannya** pasokan BBM dan **besarnya kuota** BBM di Kalimantan Utara menjadi permasalahan utama yang menyebabkan kelangkaan BBM. Pada hal BBM sangat diperlukan untuk kegiatan transportasi darat, sungai, laut maupun industri dan pembangkit listrik. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berusaha untuk memperbesar kuota pasokan BBM ke Pertamina dengan membangun infrastruktur tempat penampungan BBM di sejumlah wilayah Kabupaten yang ada di Kalimantan Utara

Potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal menjadi peluang untuk pemenuhan kebutuhan akan energi dan air di masa depan. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat memenuhi kebutuhan energi alternatif. Batubara dapat dimanfaatkan dalam bentuk energi listrik. Sebagai energi listrik, batubara merupakan sumber yang dapat diandalkan dan relatif terjangkau untuk membangkitkan tenaga listrik. Salah satu strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan dalam RPJMN 2015-2019 adalah kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan.

8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian *good governance* dan *clean governance*

Adanya ancaman dari aspek kependudukan yakni heterogenitas masyarakat yang kompleks memerlukan perhatian yang lebih. Permasalahan SARA perlu diperhatikan secara serius. Masalah keamanan dan ketertiban merupakan kerjasama terpadu antar pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban. Namun hal ini belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya untuk menurunkan K3 bahkan mencegahnya.

Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi diperlukan peran banyak aktor maupun kelembagaan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pencapaian untuk kepentingan lebih luas dalam penanganan kebencanaan secara umum belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional. Perancangan sistem terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan.

Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan keuangan daerah serta merupakan pelanggaran ekonomi, sosial dan budaya, harus dihadapi dengan cara yang luar biasa. Tingginya komitmen dari stakeholder sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi demi pembangunan di Provinsi Kaltara yang lebih baik. Di Indonesia, kejahatan korupsi sepanjang sejarah telah dijadikan musuh bersama dan bahkan perang terhadap praktik korupsi semakin intens dikalangan politisi, pejabat publik, LSM, dan juga partai politik. Bila dicermati, hampir tidak ada pemimpin yang tidak secara terbuka menyatakan unitnya untuk memberantas korupsi dan tidak ada parpol satupun pro terhadap korupsi. Komitmen seluruh stakeholder terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum menjadi mutlak diperlukan dalam

kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah harus mengantisipasinya adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik.

Di sisi lain UU ASN memberikan keuntungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang masih dibatasi oleh kebijakan moratorium pegawai, yaitu tidak diperkenankan melakukan pengangkatan pegawai hingga penyerapan anggaran rutin dapat proporsional dibandingkan dengan anggaran pembangunan. Namun demikian keterbatasan jumlah pegawai masih dirasakan sebagai masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Kondisi ini yang perlu ditinjau ulang dalam kebijakan khususnya moratorium di Provinsi Kalimantan Utara. Hal lain dalam UU ASN telah banyak menuntut peningkatan kualitas manajemen SDM pegawai, baik penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP), pemenuhan kompetensi, profesionalitas, sistem seleksi terbuka, pemenuhan standar kinerja, manajemen karir. Semua ini dapat dilakukan jika telah terkondisi sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada sistem merit secara penuh. Untuk kebutuhan merit sistem diperlukan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kompetensi, evaluasi kompetensi pegawai, pendidikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Dengan demikian kebutuhan pegawai, kebutuhan jabatan dan kompetensi semua dapat dipersiapkan.

Di sisi lain keterbatasan jumlah pegawai tersebut dihadapkan pada permasalahan masih banyaknya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yakni 92% dari seluruh desa yang ada. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Kaltara mengingat tujuan pemekaran Provinsi Kaltara adalah optimalisasi pelayanan publik dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan agar tercipta efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik apabila kondisi wilayah administratif yang terlalu luas, topografis yang sulit dijangkau, dan jauhnya jarak dengan pusat pemerintahan. Permasalahan jarak dan topografi dapat menjadi hambatan manajemen pemerintahan. Pemekaran wilayah diperlukan sebagai salah satu usaha untuk

meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Letak geografis yang berada di perbatasan antar negara menjadi permasalahan dalam manajemen pemerintahan, khususnya dalam menghadapi kerawanan disintegrasi. Khususnya Kawasan Sebatik, Kawasan Lumbis Ogong dan Kawasan Kayan Hulu yang berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia perlu mendapatkan porsi dalam politik pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Keberadaan pos lintas batas di Kayan Hulu yaitu Long Nawang hendaknya diikuti dengan kebijakan pembangunan yang proporsional, untuk mengatasi ketimpangan. Secara fisik tampak nyata ketimpangan fasilitas kota antara ketiga kawasan ini dengan kota terdekat di Malaysia. Kota terdekat di Malaysia memiliki fasilitas yang sangat baik dengan kondisi pembangunan yang jauh lebih maju. Sedangkan kondisi di tiga kawasan ini memiliki fasilitas sangat terbatas, bahkan di Long Nawang sebagai pos lintas batas merupakan wilayah terisolir. Disparitas sosial ekonomi dan minimalnya fasilitas kawasan dapat mendorong terjadinya semangat disintegrasi, sehingga kawasan ini dapat memisahkan diri dari Indonesia dan sebaliknya bergabung dengan Malaysia, sehingga membahayakan bagi keutuhan NKRI dan kedaulatan Negara.

Kawasan yang terisolasi karena terbatasnya akses ke pusat pelayanan lokal mengakibatkan kebutuhan dasar sangat mahal dan tidak terpenuhi secara proporsional. Oleh karena itu banyak masyarakat mengakses pelayanan dasar di Malaysia. Fenomena ini dapat menimbulkan masyarakat perbatasan memiliki ikatan emosional dengan Malaysia, selain karena masyarakat perbatasan memiliki ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang cukup erat sejak jaman dulu. Daya simpati dan empati akan tumbuh dan memungkinkan masyarakat perbatasan memungkinkan mengubah kewarganegaraan. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan politik pemerintahan, untuk memberikan kewenangan kepada tiga kawasan ini untuk mengelola wilayah administratif sebagai daerah otonom baru. Jika dipertahankan dengan status kecamatan dan desa maka kewenangan menjadi sangat terbatas, dan tidak memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan pembangunan.

9. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara adalah seluas 6,9 juta hektar atau lebih dari 90% luas wilayahnya. Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas total sekitar 3,3 juta hektar. Selain itu terdapat Hutan Lindung (HL)

seluas 976.687,86 ha dan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang (1.025.879,61 ha) yang pengelolaannya merupakan wewenang pemerintah pusat.

Pemanfaatan sumber daya hutan, terutama kawasan Hutan Produksi, dilaksanakan oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) ataupun hutan tanaman (IUPHHK-HT), dari pengusaha swasta dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemegang izin pemanfaatan kayu di Kalimantan Utara adalah 33 buah IUPHHK-HA dan 3 buah IUPHHK-HT (2012). Jumlah ini, khususnya hutan tanaman, masih akan bertambah lagi di masa depan dikarenakan beberapa perusahaan baru masih dalam taraf persiapan dokumen AMDAL. Hal ini masih ditambah dengan adanya IUP perkebunan sawit mencapai 615.000 hektar dan IUP pertambangan batubara sekitar 960.000 hektar atau total sekitar 4,85 juta hektar, atau sekitar separuh dari wilayah sudah tertanam investasi skala besar hanya tiga komoditas saja yaitu kayu, sawit dan batubara. Selama tahun 2008-2012 luas lahan perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 119,44% dari 62.609,50 Ha (tahun 2008) menjadi 137.389,00 Ha (tahun 2012). Peningkatan yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten Bulungan dari 9.022,50 Ha menjadi 47.363,00 Ha, demikian juga di Kabupaten Nunukan dari 53.587,00 Ha menjadi 84.705,00 Ha.

Peningkatan produksi batubara disatu sisi menguntungkan karena dapat meningkatkan PDRB pertambangan non migas yang akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD, tetapi di sisi lain mengakibatkan peningkatan area penambangan batubara dan **kerusakan lingkungan** antara lain: 1) pengaruh air asam tambang yang berasal dari limbah batuan sedimen, 2) kerusakan infrastruktur jalan, 3) kebisingan aktifitas penambangan, 4) kualitas udara, 5) limbah BBM dari kendaraan angkut tambang, 6) tidak melakukan reklamasi pasca penambangan atau kualitas reklamasi sangat jelek, 7) banyak terjadi genangan air pada area bekas penambangan, 8) meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air sungai. Untuk menekan terjadinya kerusakan lingkungan pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yang melarang ekspor batubara sebagai bahan mentah, tetapi harus meningkatkan nilai tambah antara lain: 1) meningkatkan nilai kalori batubara, 2) mengurangi kadar debu, kadar sulfur, dan kadar air, 3) memanfaatkan untuk energi listrik (PLTU), 4) membuat industri briket batubara. Dengan demikian akan dapat menekan laju produksi batubara mentah dan mengkonsevasi atau memperpanjang umur penambangan batubara dan menekan laju kerusakan lingkungan.

Selain itu diperkirakan jumlah penduduk di Provinsi Kaltara akan terus bertambah sementara itu luasan wilayah relatif tetap. Khususnya bagi Kota Tarakan, Pulau

Nunukan dan Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, tersedianya kebutuhan akan energi dan air di masa depan perlu mendapat perhatian utama yang segera diantisipasi, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sebagai akibat terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi. Kondisi demikian membawa konsekuensi terhadap kemampuan akses penduduk terhadap ketersediaan energi dan air. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan identifikasi lokasi-lokasi baru yang dapat digunakan sebagai daerah pemasok energi baru atau alternatif dan air sehingga dapat mendukung bertambahnya jumlah penduduk.

Demikian pula dengan kebutuhan air di masa depan dapat memanfaatkan sumber daya air berupa air permukaan, mengingat di provinsi terdapat sungai besar yang bersumber di hulu. Akan tetapi pemanfaatan sumber daya air berasal dari sungai hanya dapat terjamin keberlangsungannya jika wilayah hulu, sebagai daerah cadangan air, terjaga kelestarian lingkungannya. Dalam arti hutan di wilayah hulu masih tetap terjaga dan tidak terjadi penggundulan atau pengrusakan hutan yang mengakibatkan rusaknya cadangan air tanah di wilayah tersebut.

7.2. RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program - program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama di Provinsi Kaltara masa bakti 2016-2021.

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kaltara menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara yang terkait langsung dengan rencana aksi daerah (RAD) yang merupakan implementasi Misi 1 yaitu mewujudkan Provinsi Kaltara yang mandiri dengan sasaran berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah disajikan pada **Lampiran 1**. Adapun SKPD terkait untuk mewujudkannya diantaranya pertama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kedua Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, ketiga Dinas Kelautan dan Perikanan, dan keempat BPPMPPKBP. Sementara SKPD lainnya hanya penunjang terwujudnya visi dimaksud. Akan tetapi peran seluruh stakeholder di Kaltara juga harus berkontribusi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan terutama LSM dan perusahaan yang berinvestasi di Kaltara.